DIO: Selamat siang Mbak \*\*\*\* dan Mas \*\*\*\* Perkenalkan nama saya Dio Graha Putra Pangestu saya mahasiswa PKN STAN jurusan D4 akuntansi alih program AKT yang saat ini sedang mengerjakan skripsi dan melakukan penelitian. Sebelum memulai sesi wawancara mohon izin untuk melakukan konfirmasi atas jabatannya. Apakah benar dari Mbak \*\*\*\* apakah benar mbak \*\*\*\* adalah pelaksana di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Sorong?

PKN1: Iya benar

DIO: Kalo untuk Mas \*\*\*\* apakah benar juga Mas \*\*\*\* adalah pelaksana di seksi PKN KPKNL Sorong?

PKN2: Iyak betul Mas Dio

DIO: oke langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana prosedur untuk pemindahtanganan dengan melalui penjualan BMN? yaitu mungkin dari alurnya terus jangka waktunya mungkin dari step by stepnya terus dasar hukumnya apakah ada? monggo mbak atau mas.

PKN1: untuk penjualan BMN dasar hukumnya diatur di PMK 111 tahun 2016 tentang pemindahtanganan BMN itu merupakan turunan dari PP 27 tahun 2016 yang dirubah dengan…saat ini dirubah dengan PP 28 tahun 2020. Sedangkan untuk alur, alur pertama itu untuk permohonan penjualan ketika permohonan masuk dari satker kita masuk ke..eee..apa tuh namanya…Nadine ya di Nadine di surat masuk, terus disposisi nanti kita verifikasi kelengkapan, verifi..verifikasi kelengkapan berkas untuk SOPnya itu dari permohonan sampai persetujuan itu adalah maksimal 7 hari, tetapi untuk SOPnya bisa berhenti ketika…nanti ketika verifikasi itu kalau sudah lengkap kita minta permohonan penilaian ke Seksi Penilaian, kemudian di Seksi Penilaian memberikan jadwal..jadwal penilaian kemudian dari PKN memberikan surat..ee..surat penyampaian jadwal penilaian kepada satker. Nah saat kita menyampaikan surat ke satker itu SOPnya berhenti tuh dimulai dari nol lagi itu, nah habis itu setelah Penilaian melakukan penilaian terus nanti memberikan laporan kepada PKN, nah dari situ SOPnya dihitung lagi. Dari hasil penilaian itu untuk menentukan nilai limit kita langsung memberikan persetujuan yaitu jangka waktunya 7 hari lagi, Mas \*\*\*\* ada yang kurang nggak? silakan ditambahkan

PKN2: Mungkin kurang lebih seperti itu Mas Dio

DIO: Oke, ho o, berarti kalau di KPKNL Sorong sendiri emang berarti dari 7 hari jadi masing-masing 5 hari ya, untuk dari awal 5 hari kemudian yang kedua yang SOPnya jalan lagi itu 5 hari lagi gitu ya Mbak?

PKN1: Iya. Itu..untuk kalau..kan kadang juga ada yang permohonan yang satker itu sudah melakukan Penilaian..penilaian duluan itu juga ada. Kalau yang tadi itu *case*nya kan masih belom dilakukan penilaian, nah kalau satker udah..udah minta permohonan penilaian dulu kan pasti mereka sudah pegang laporan penilaian, berarti mereka tinggal permohonan penghapusan langsung kalau itu maksimal 5 hari tanpa..tanpa penilaian.

DIO: Oke, berarti nanti setelah pemohon dapat persetujuan langsung..kalau mau lelang langsung menghubungi ke Seksi Lelang ya? gak melalui PKN lagi ya Mbak?

PKN1 : Iya, betul

DIO: Oke Mbak, jelas jelas

DIO: Langsung aja ke pertanyaan kedua ya Mbak dan Mas \*\*\*\*. Nah ini terkait perbedaan di dalam kota dan di luar kota untuk satkernya. Lebih sulit memproses pengajuan penjualan BMN di dalam kota atau di luar kota atau sama aja tidak ada pengaruh? Nah kalau ada kesalahan atau kekurangan dokumen biasanya satker yang lebih cepat melengkapi berkasnya yang di dalam kota atau yang di luar kota? itu tadi apakah jaraknya berpengaruh nggak?

PKN2: Mungkin gini…gini sorry Mbak \*\*\*\*. Kalau untuk yang dalam kota sama luar kota itu Mas Dio itu sebenarnya tergantung dari satkernya. Ada satker yang dia sebenarnya posisinya ada di dalam kota cuman wilayah kerjanya itu dia memang luas yang sampai..ee..bahkan sampai seluruh Papua Barat bisa jadi lokasi barangnya itu kadang yang diusulkan itu tidak berada di satu lokasi. Ini yang biasanya agak agak paling sulit, biasanya sih kita meminta agar barang-barang tersebut bisa dipindahkan ke lokasi yang paling efisien lah. Misal dari Manokwari Selatan kita minta kumpulkan di Manokwari saja.

DIO: Dikumpulkan gitu

PKN2: karena dia memang wilayah kerjanya luas. Ya memanglah kalo luar kota pasti...pasti lebih sulit dari yang didalam kota, apalagi di Papua yang jaraknya jauh-jauh

DIO: Berarti bukan soal satker posisinya dimana tapi BMN-BMNnya ya Mas yang..yang apa..keberadaan BMNnya di dalam kota atau di luar kota, kalo diluar kota lebih baik dikumpulkan gitu?

PKN2: Yang kita rasakan seperti itu, mungkin Mbak \*\*\*\* ada pengalaman lain mungkin yang bisa di share Mbak

PKN1: Aku mungkin nambahin aja ya Dio, kalo tadi yang Dio nanya untuk permohonan penjualan di dalam dan di luar kota sih selama ini gak ada..gak ada perbedaan gitu, kecuali yang tadi \*\*\*\* bilang itu tentang keberadaan BMNnya dimana, cuman kalo untuk permohonan penjualan mau satker dalam kota atau diluar kota sih sama aja, sedangkan kalo untuk respon, respon juga sekarang kan ada WA ada email itu juga tidak ada kendala sih dan tidak ada perbedaan, gitu.

DIO: Oke Mbak Mas jelas, untuk mempersingkat waktu langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Nah apakah BMN memiliki nilai buku? Nah jika iya, dimana kita bisa mengetahui nilai buku BMN? Monggo

PKN1: nilai buku setauku ada di SIMAN, itu ada di data *master asset* itu ada nilai buku, nilai perolehan, sama nilai perolehan pertama kalau nggak salah ya \*\*\* aku lupa.

PKN2: he eh untuk nilai buku itu tercatatnya di SIMAK, nanti ketika dia sudah di sinkronkan ke SIMAKnya maka dia akan terupdate juga di *master asset* di SIMANnya, dan nilai buku ini terus bergerak sesuai dengan transaksi yang terjadi di objeknya.

DIO: Semakin lama semakin turun gitu gak Mas karena ada penyusutan gitu apakah nilai bukunya semakin turun gitu?

PKN2: Untuk penyusutan iya, penyusutan tiap semester pasti ada, penyusutan reguler ini tergantung objeknya nih misal objeknya berupa bangunan bisa jadi ternyata disitu ada penganggaran untuk..apa namanya..rehab atau perbaikan mungkin nilai bukunya juga akan ikut gerak naik, seperti itu.

DIO: Oke, siap Mas makasih Mas. Langsung ke pertanyaan keempat ya Mas Mbak. Nah apakah seluruh usulan penjualan BMN pasti diterima?, nah bagaimana apabila terdapat usulan penjualan dengan..BMN dengan nilai buku kecil, misalkan dibawah 2 juta, apakah tetap harus diterima? Monggo Mas atau Mbak

PKN1: Selama ini usulan penjualan BMN itu..

PKN2: Mbak \*\*\*\* monggo Mbak

PKN1: Iya, Selama ini usulan penjualan BMN itu kami tidak memperhatikan nilai buku ya Dio, namun memperhatikan nilai perolehan dari jenis…dan jenis BMN. Yang diproses oleh KPKNL itu kan untuk BMN yang nilai perolehannya lebih dari 100 juta atau dia memiliki Dokumen kepemilikan seperti kendaraan, kurang lebih begitu Dio.

DIO: Nilai perolehan itu nilai pembelian pertama gitu bukan ya Mbak? nilai untuk mendapatkan aset itu?

PKN1: Iya

DIO: Siap, jelas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Nah apabila hasil penilaian BMN yang akan dijual berbeda dari nilai bukunya atau nilai perolehannya, ini berdasarkan nilai limit..eh nilai limit..nilai wajar yang dihasilkan, nah bagaimana perlakuan pencatatannya? Misalkan nilai bukunya atau nilai bukunya misalkan 2 juta terus dari hasil penilaian wajar dari Seksi Penilaian hasilnya 3 juta, nah itu perlakuan di pencatatannya gimana? Apakah bisa di-*update* gitu nilai bukunya?

PKN2: Maksudnya pencatatan gimana ini Io?

DIO: Saya ulang ya Mas, nah apabila hasil penilaian BMN yang akan dijual berbeda dari nilai bukunya, bagaimana perlakuan pencatatannya, pencatatan di SIMAK atau SIMAN? Apakah nilai bukunya di-*update* apa nggak? Gitu

PKN2: Oh kalau dalam hal penjualan, logikanya ketika barang itu mau dijual, sebenernya kan kondisinya sudah posisi rusak berat, sudah diusulkan menjadi posisi rusak berat ya. Mungkin memang masih ada..bisa jadi masih ada nilai buku yang tersisa, misal biasanya kendaraan nih kendaraan kan biasanya biarpun barangnya masih bagus tapi ketika dia udah melewati 7 tahun, kalau dalam aturannya 7 tahun, itu kan memang sudah bisa diajukan untuk penghapusan

DIO: hmm…gitu

PKN2: Untuk...apa namanya…pencatatan penilaiannya itu sebenernya gak dicatat ya, jadi ketika..ketika kita..apa namanya..mendapatkan usulan penghapusan itu kemudian kita ber-nota dinas ke Seksi Penilai dan tim penilai menilai itu dia tidak..tidak..kemungkinan tidak terlalu melihat nilai buku tapi melihat fakta yang ada di kendaraan tersebut atau di objeknya, biarpun semisal nilainya masih tinggi di nilai bukunya karena dia cuma kena penyusutan reguler tapi ketika di cek barangnya kok sudah..sudah sangat rusak..rusak parah tentu nilainya bisa..bisa jauh lebih rendah nantinya, begitu juga sebaliknya. Untuk..untuk nilai itu nantinya nggak dicatat tapi memang itu yang nanti akan diusulkan untuk nilai limit ketika kita lakukan persetujuan dan nanti bisa jadi nilai limit ketika mengusulkan lelang

DIO: Oke siap Mas

PKN2: Jadi gak dicatat di SIMAKnya itu nggak..nggak ada pencatatan disitu.

DIO: Oke, jadi tidak ada pencatatan itu ya Mas. Oke nah sekarang terkait pertanyaan keenam Mas atau Mbak, ini terkait pertimbangan biaya dan manfaat, nah ini kan terkait tema..tema skripsi saya kan pertimbangan biaya dan manfaat. Nah adakah pertimbangan biaya dan manfaat dalam menerima usulan pelayanan penjualan BMN? Nah itu baik dari sisi peraturan resmi atau kebijakan internal kantor. Misalkan BMN dengan nilai buku tertentu atau nilai wajar tertentu tidak dihapus dengan cara dijual karena biaya perjalanan dinas pasti melebihi nilai buku atau nilai wajar, atau BMN sampai nilai tertentu dijual menggunakan nilai buku saja..

DIO: Halo? Halo?

PKN2: Halo Mbak \*\*\*\*? Dio?

DIO: Ya denger Mas

PKN1: Ya..ya?

DIO: Sudah denger Mas?

PKN2: Yak sudah ada..sudah ada suaranya

PKN1: \*\*\*? Ngopo \*\*\*?

DIO: Tak…tak ulang ya Mas ya? Mas..Mbak \*\*\*\*. Nah terkait pertimbangan biaya dan manfaat dalam menerima usulan penjualan BMN, nah apakah ada pertimbangan biaya dan manfaat dalam menerima usulan penjualan BMN di KPKNL Sorong? Baik dari sisi peraturan atau kebijakan internal? Nah misalnya BMN dengan nilai buku tertentu tidak dihapus dengan cara dijual karena biaya perjalanan dinas pasti melebihi nilai buku atau nilai wajarnya, nah contohnya seperti itu. monggo Mas atau Mbak

PKN2: Kalau selama ini kita nggak…sama seperti pertanyaan sebelumnya ya, kita nggak terlalu, kita nggak memperhatikan itunya ya Io…nilainya ya, kita lebih memperhatikan bahwa barang itu memang secara aturan sudah bisa diusulkan untuk penghapusan justru kita akan..ee..melakukan..ee..satker untuk segera melakukan penghapusan. Karena ini..ini..kita disini kan sebagai pengelola kan untuk mengarahkan satker agar bisa mengelola BMNnya sesuai aturan ya

DIO: Oh seperti itu

PKN2: Memang kalau dilihat dari..apalagi di Papua Barat, dengan jarak yang cukup jauh-jauh antara wilayahnya, memang bisa jadi yang..biaya untuk..terutama tim penilai ya ketika turun dibandingkan nanti ketika hasil penjualannya bisa jadi memang lebih banyak biayanya, itu bisa jadi. Tapi biasanya sih..ee..trik dari KPKNL Sorong itu kita melihat nih semisal dalam satu bulan ini ada usulan berapa? Kita efisiensikan lokasinya kita kumpulkan jadi satu tempat, semisal ini yang di Manokwari ada banyak, tapi nanti sekiranya temen-temen penilai ketika mau turun itu kita udah tau kalau ketika mereka turun..misal dalam waktu 5 hari mereka bisa dapat beberapa satker. Dari disitu kan kita udah ada usaha *effort* untuk menaikkan efisiensi biaya nih biar enggak bolak-balik, lebih..lebih ini..lebih efisien penggunaan biaya anggaran juga dari KPKNL. Mungkin Mbak \*\*\*\* ada yang mau..mungkin tambahan juga Mbak?

PKN1: Mungkin menambahkan, iya tadi setuju sama \*\*\*\*, bahwa selama ini permohonan penjualan BMN kami mengacunya kepada ketentuan, tidak mempertimbangkan biaya dan manfaat, selama dokumen lengkap ya langsung…kita langsung proses. Misalnya di ketentuan itu kan ada ya..kem apa..PKN dapat melakukan cek fisik. Selama ini cek fisik yang kita lakukan itu ketika dokumen itu kurang dan itu juga untuk yang di dalam kota, kalau yang di luar kota kita langsung mengirimkan surat biasanya gitu.

DIO: Oh seperti itu, oke Mbak Mas jelas, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mas..Mbak..Mas. Ini terkait seandainya atau terkait..apa..pendapat aja, ini kan di sektor swasta atau BUMN secara ketentuan apabila ingin memindahtangankan aset tetap dengan..misalkan dengan dijual maka biayanya harus lebih rendah dari nilai ekonomis yang di..yang rencana akan didapat. Jadi mereka menerapkan pertimbangan biaya dan manfaat. Nah menurut Mas dan Mbak apakah sebenarnya prinsip tersebut bisa diterapkan di sektor pemerintah atau sektor publik? Nah jika ada alasannya monggo

PKN1: Aku dulu \*\*\*. Mungkin sebenernya bisa ya Dio, cuman kan kita kan di pemerintahan itu tugas dan fungsinya tidak..tidak memperhatikan profit itu loh..gimana ya..namun kita tuh lebih mengacu kepada aturan atau ketentuan yang berlaku, jadi bisa aja sih kalau mau seperti itu asal ada aturan atau ada ketentuan yang kita..yang kita bisa mengacu kesitu gitu

DIO: Baik Mbak siap, apakah Mas \*\*\*\* ada tambahan atau cukup?

PKN2: Mungkin gini ya tambahannya, kembali lagi kita disini kan sebagai pengelola BMN yang melakukan pelayanan ke temen-temen satker kementerian lembaga yang lainnya. Jadi kalau kita terlalu memperhatikan itu tadi yang..mungkin aturan di BUMN, itu akan ada kemungkinan satker yang memang asetnya nggak banyak atau nggak besar kalau kita itung-itung itu terus kita nggak melakukan pelayanan justru kita malah..ee..berada di posisi yang salah. Karena kita disini salah satu tugasnya adalah melayani, ini dalam hal pengelolaan BMN di satker-satker, seperti itu Mas Dio

DIO: Oke siap, berarti karena KPKNL…saya sedikit menyimpulkan, karena KPKNL sebagai pelayanan dan menjalankan aturan, jadi mungkin bisa saja selama aturannya disesuaikan seperti itu ya Mbak Mas

DIO: mungkin lanjut ke pertanyaan kedelapan, ini terkait hibah. Apakah KPKNL Sorong pernah menerima usulan hibah dari pengguna barang? jika iya apakah usulan tersebut mengeluarkan biaya dari sisi KPKNL? Misalkan harus kunjungan ke lapangan atau yang lain-lain. Monggo Mas atau Mbak.

PKN1: selama kemarin tahun 2000…kemarin 2020 ada satu usulan hibah dari Kementerian Agama, Kementerian Agama itu asetnya tanah bangunan yang dihibahkan ke Pemkot Sorong. Nah itu aku melakukan cek fisik satu hari dalam kota, karena pertimbangannya..pertimbangannya itu nilainya lumayan besar, 2 milyar, nilai perolehannya 2 milyaran. Kemudian di aturan pun dapat dimungkinkan KPKNL melakukan cek fisik gitu Dio. Jadi kita melakukan..aku kemarin..apa..ngecek fisik kesana gitu.

DIO: Oke…siap Mas Mbak. Nah ini terkait pertanyaan kesembilan nih.

PKN1: Kalau sebelumnya aku belum tahu sih pas 2019 aku belum tahu.

DIO: Oke, mungkin langsung ke pertanyaan kesembilan ya. Ada dua pertanyaan lagi tapi ini pertanyaan kesembilan. Nah berdasarkan PMK pemindahtanganan BMN, penilaian wajar tidak diperlukan dalam hibah itu kalau secara ketentuan yang saya baca. Nah sehingga tidak perlu biaya perjalanan dinas penilaian BMN mohon koreksinya jika salah, serta pastinya hibah tidak memerlukan lelang BMN. Bagaimana pendapat anda apabila misalnya BMN dengan nilai buku kurang dari nilai tertentu sebaiknya dihibahkan saja? atau tetap dijual dengan menggunakan nilai buku dan dengan penjualan langsung? apakah secara praktek memungkinkan? jika ada kendala mungkin apa kendalanya? Monggo Mbak atau Mas

PKN1: Aku dulu ya \*\*\*. Kalau dari..kan ini ada ada dua..ada dua sisi ya Dio, satu hibah, Emang betul kalau hibah itu tidak dilakukan penilaian dan tidak dilakukan lelang, untuk..apa..pertanyaan Dio terkait misalnya..apa tadi..misalnya BMN dengan nilai buku kurang dari nilai tertentu sebaiknya dihibahkan saja, ee..selama ini kan antara hibah dengan penjualan itu kan mereka memiliki dua posisi yang berbeda tuh Dio antara latar belakang sama tujuannya aja udah lain. Kalau hibah..kalau hibah itu kan dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan agama, sosial, budaya, pendidikan, dan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Sedangkan untuk penjualan BMN pertimbangannya itu kan untuk optimalisasi BMN ketika dia tidak digunakan untuk kepentingan tugas dan fungsi K/L, kemudian secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual, dan yang ketiga sebagai pelaksanaan undang-undang. Nah selama ini untuk per..per..permohonan penjualan ya kita proses untuk penjualan, tidak..kita tidak pernah merekomendasikan penjualan karena nilainya kecil dihibahkan saja, selama ini sih belum pernah, gitu.

DIO: Oke, berarti karena dari latar belakangnya yang berbeda jadi dari Sorong tidak..he e..tidak berani merekomendasikan, seperti itu? dan secara ketentuan juga tidak boleh gitu ya Mbak ya?

PKN1: Betul

DIO: Mungkin Mas \*\*\*\* mau nambahin atau cukup langsung ke pertanyaan terakhir terkait pemusnahan?

PKN2: Dah *clear* Io.

DIO: Langsung…oke, nah terakhir apakah KPKNL pernah menerima usulan pemusnahan BMN? Jika ya apakah perlu dilakukan cek fisik dari KPKNL? dan apakah pihak KPKNL harus hadir saat pemusnahan? Monggo Mas atau mbak.

PKN2: Mbak \*\*\*\* kayaknya…barusan

PKN1: kalo pemusnahan.. kalo pemusnahan…pemusnahan selama ini yang kita proses itu yang dari eks Bea Cukai itu Dio

DIO: Barangnya apa tuh Mbak?

PKN1: Nah biasanya…barangnya ada vape…vape pernah, terus tembakau..tembakau yang udah dihalusin itu, terus kemarin itu yang terakhir itu yang..

PKN2: Miras…miras

PKN1: Iya miras. Terus yang banyak itu macam-macam itu ya \*\*\* ya dari BC..BC Sorong sini, ada parfum, ada..apa..bibit benih, ada..itu sak..sak..yang..yang BC Sorong itu yang banyak banget itu sak..sak ombyokan itu Dio. Ee…untuk pertimbangan kita melakukan cek fisik biasanya kita itu untuk yang di Sorong aja kita lakukan cek fisik, sedangkan yang di Fakfak atau Manokwari kita minta..kita minta fotonya aja sama satker karena kemarin itu pertimbangannya karena DIPA juga kan, DIPAnya terbatas gitu Dio. Jadi kita kemaren untuk cek fisik kita lakukan di BC Sorong saja

DIO: BC Sorong saja…berarti kalau untuk hadir juga seperti itu ya Mbak? kalau untuk harus hadir berarti untuk yang dalam kota aja?

PKN1: kalau hadir…kalau di ketentuan harusnya itu kita tuh diikutkan, tapi selama ini BC itu nggak..nggak..nggak..nggak ngundang gitu loh Dio.

DIO: Jadi pengalaman…secara pengalaman pernah untuk..pada saat pemusnahan KPKNL…pihak dari KPKNL Sorong nggak ada gitu ya Mbak?

PKN1: He e

PKN2: Mungkin nambahin dikit Io, terkait pemusnahan dari eks Bea Cukai itu memang..ini dari..dari pengalaman kita ya..mulai dari 2019 2020 ya..memang untuk yang Bea Cukai tuh yang terbesar memang di Sorong, mungkin karena disini juga pelabuhan terbesar ke Papua Barat kan ada disini ya, jadi barang-barang awal itu memang masuknya kesini, biasanya kalau dari Bea Cukai Sorong itu barangnya lebih banyak memang, variative barang-barangnya itu, nah melihat banyaknya itu kita malah cenderung…kita harus periksa nih, kemudian dari Bea Cukai Manokwari lumayan banyak…kemarin lumayan banyak, ada…terutama minuman keras sama liquid vapor itu. nah untuk yang pengalaman kemarin yang Bea Cukai Fakfak, Babo itu memang kecil-kecil. Pernah waktu..kan ketika..peng..peng..pengajuan kan kita bisa lihat nih barangnya apa aja, dan ketika kita lihat cuma tiga botol minuman keras berjenis sopi gitu, itu sebenernya juga kalo kita kesana satu orang saja sudah berapa juta sekali kesana dengan penginapannya, uang hariannya, sedangkan kita sudah tau nih barangnya ternyata cuma..yang diusulkan tiga botol sopi. Melalui pertimbangan…terlalu ini..apa namanya..kemungkinan untuk di..dimainkan oleh Bea Cukai pun juga kecil kan, mau…mau diapain sih tiga botol sopi gitu. Itu biasanya kita usulkan untuk…kita minta foto aja nih, ndak usah kita ke lapangan. Tapi kalo yang isinya itu macem-macem banyak..semisal di Fakfak itu dia usulannya kok sampe banyak, ada kemungkinan pasti kita…pasti kita harus cek nih barangnya, bener apa ndak, jadi tergantung yang diusulkan juga sih

DIO: Oh tergantung ini..

PKN2: Dan lokasinya

DIO: Barangnya juga…lokasi dan barang gitu ya?

PKN2: iya

DIO: Oke karena…pertanyaan sudah habis, dan ini kan nggak…

PKN1: Dio pake Zoom gratisan ya Dio

DIO: Ho o, pake Zoom gratisan, berarti langsung di…saya *stop record* dulu ya, keburu mati, oke makasih Mas Mbak saya *stop record* dulu.